



## Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Membangun Keterlibatan Perempuan dalam Musrenbang Desa Onowaembo Hiligara

Vester Laoli<sup>1\*</sup>, Delipiter Lase<sup>2</sup>, Serniati Zebua<sup>3</sup>, Eliagus Telaumbanua<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Manajemen, Universitas Nias, Gunungsitoli, Indonesia

Penulis Korespondensi: [vester.laoli@gmail.com](mailto:vester.laoli@gmail.com)

### Informasi Artikel

#### Historis Artikel

Diterima: 9 Maret 2026  
Revisi: 12 Maret 2026  
Disetujui: 19 Maret 2026  
Tersedia online: 19 Maret 2026

#### Kata Kunci

kepemimpinan kepala desa,  
keterlibatan perempuan,  
Musrenbang Desa, partisipasi,  
pembangunan desa

#### Keywords

village head leadership, women's  
participation, village development  
planning meeting, participation,  
village development



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Hak cipta © 2026 oleh Penulis. Diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nias

### Abstrak/Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik kepemimpinan kepala desa dalam memfasilitasi keterlibatan perempuan dalam Musrenbang Desa Onowaembo Hiligara, faktor pendukung dan penghambatnya, serta strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas partisipasi perempuan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tujuh informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa berperan penting melalui komunikasi terbuka, pemberian kesempatan berbicara, dan pengelolaan forum yang lebih inklusif. Faktor pendukung utama meliputi komitmen kepala desa, dukungan perangkat desa, peran PKK, dan komunikasi yang inklusif. Faktor penghambat meliputi beban domestik, rasa malu, kurang percaya diri, keterbatasan pemahaman teknis, dan budaya patriarki. Strategi yang efektif mencakup briefing, pendampingan, pelatihan, dan diskusi awal sebelum Musrenbang.

*This study analyzes the village head's leadership practices in facilitating women's involvement in the Musrenbang Desa of Onowaembo Hiligara Village, the supporting and inhibiting factors, and effective strategies to improve the quality of women's participation. A qualitative approach with a case study design was employed. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving seven informants. The findings show that the village head's leadership plays an important role through open communication, equal speaking opportunities, and more inclusive forum management. The main supporting factors include the village head's commitment, support from village officials, the role of the PKK, and inclusive communication. The inhibiting factors include domestic responsibilities, shyness, lack of self-confidence, limited technical understanding, and patriarchal culture. Effective strategies include briefings, mentoring, training, and preliminary discussion before the Musrenbang.*

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian penting dari agenda pembangunan nasional karena desa menjadi ruang terdekat antara pemerintah dan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan, menyusun prioritas, serta melaksanakan program pembangunan. Dalam kerangka desentralisasi, desa tidak lagi diposisikan hanya sebagai pelaksana kebijakan dari atas, tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang memiliki kewenangan untuk merencanakan pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. Karena itu, kualitas pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kualitas partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Landasan normatif mengenai hal ini tampak dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang

\*Penulis Korespondensi  
Alamat e-mail: [vester.laoli@gmail.com](mailto:vester.laoli@gmail.com) (Penulis Pertama)

menegaskan pembangunan desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Salah satu mekanisme formal yang dirancang untuk mewadahi partisipasi tersebut adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Musrenbang Desa merupakan forum deliberatif yang mempertemukan pemerintah desa dan unsur masyarakat untuk membahas kebutuhan, usulan, serta prioritas pembangunan desa. Dalam perspektif pembangunan partisipatif, partisipasi masyarakat tidak berhenti pada kehadiran fisik dalam forum, tetapi mencakup keterlibatan dalam menyampaikan aspirasi, memengaruhi keputusan, terlibat dalam pelaksanaan, serta menilai hasil pembangunan. Pandangan ini sejalan dengan literatur partisipasi yang menekankan bahwa keterlibatan warga harus dipahami secara substantif, bukan semata-mata prosedural (Cornwall, 2008).

Secara normatif, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa telah memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan pentingnya penyelenggaraan pembangunan desa secara partisipatif, sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa mengatur bahwa perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat desa. Kedua regulasi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa pada dasarnya dirancang untuk berlangsung secara inklusif, transparan, dan berbasis kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok perempuan.

Namun, pada tingkat implementasi, partisipasi dalam forum pembangunan desa tidak selalu berlangsung secara setara. Salah satu persoalan yang masih sering muncul adalah keterlibatan perempuan yang belum sepenuhnya substantif. Perempuan kerap hadir dalam forum, tetapi belum tentu memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan aspirasi, memengaruhi keputusan, atau terlibat dalam evaluasi hasil pembangunan. Dalam literatur partisipasi, kondisi semacam ini menunjukkan bahwa kehadiran formal belum identik dengan distribusi pengaruh yang setara dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, partisipasi perempuan dalam Musrenbang Desa perlu dilihat bukan hanya dari jumlah kehadiran, tetapi juga dari kualitas keterlibatan mereka (Arnstein, 1969).

Kondisi tersebut juga tampak dalam pelaksanaan Musrenbang Desa di Desa Onowaembo Hiligara, Kecamatan Hiliduho, Kabupaten Nias. Berdasarkan dokumentasi musyawarah desa yang digunakan dalam artikel ini, jumlah perempuan yang hadir dalam forum Musrenbang masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pada musyawarah desa untuk perencanaan tahun 2025 tercatat 32 peserta, terdiri atas 18 laki-laki dan 14 perempuan. Pada musyawarah desa untuk perencanaan tahun 2026 tercatat 51 peserta, terdiri atas 35 laki-laki dan 16 perempuan. Data ini menunjukkan bahwa perempuan telah hadir dalam forum perencanaan desa, tetapi proporsinya masih belum seimbang. Lebih jauh, kehadiran tersebut belum otomatis menunjukkan bahwa perempuan memiliki pengaruh yang sama dalam proses perumusan prioritas pembangunan desa.

Keterbatasan partisipasi perempuan dalam forum pembangunan desa tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya masyarakat. Dalam banyak komunitas perdesaan, ruang publik dan pengambilan keputusan masih lebih sering didominasi oleh laki-laki, sedangkan perempuan lebih banyak diasosiasikan dengan ranah domestik. Akibatnya, perempuan kerap menghadapi hambatan berupa rasa sungkan, kurang percaya diri, keterbatasan akses informasi, beban domestik, serta anggapan bahwa forum perencanaan desa bukan ruang utama bagi mereka. Situasi ini menyebabkan partisipasi perempuan sering bersifat prosedural, belum substantif. Karena itu, pendekatan yang menempatkan perempuan sebagai aktor pembangunan perlu didukung oleh tata kelola forum yang lebih inklusif (Cornwall, 2008).

Dalam konteks tersebut, kepemimpinan kepala desa menjadi faktor yang sangat penting. Kepala desa tidak hanya berfungsi sebagai pejabat administratif, tetapi juga sebagai aktor kunci yang menentukan iklim partisipasi dalam forum desa. Pemimpin yang terbuka, komunikatif, dan partisipatif cenderung lebih mampu menciptakan ruang dialog, membangun rasa aman bagi peserta, serta memastikan bahwa kelompok yang selama ini kurang dominan, termasuk perempuan, memiliki kesempatan yang lebih setara untuk terlibat. Kepemimpinan, dalam pengertian ini, bukan sekadar kemampuan mengarahkan, tetapi juga kemampuan memengaruhi,

memfasilitasi, dan membangun kondisi yang memungkinkan keterlibatan warga secara lebih luas (Northouse, 2021).

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam Musrenbang masih menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersumber dari budaya lokal, desain kelembagaan forum, maupun dukungan kepemimpinan setempat. Ali (2023), misalnya, menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam Musrenbang tingkat desa di Kota Banda Aceh dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat dan dukungan kepemimpinan lokal. Penelitian Monica & Fauziah (2017) juga memperlihatkan bahwa partisipasi perempuan dalam pembangunan desa dapat cukup menonjol pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, tetapi belum maksimal pada tahap evaluasi dan pemantauan, dengan kendala utama berupa keterbatasan waktu, dana, dan pengetahuan. Temuan yang lebih baru dari Neno dkk. (2025) turut mengindikasikan bahwa partisipasi perempuan dalam Musrenbang masih dihadapkan pada stereotip gender dan terbatasnya peluang untuk terlibat secara strategis. Berbagai temuan tersebut menegaskan bahwa kualitas partisipasi perempuan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan forum secara formal, tetapi juga oleh bagaimana forum tersebut dikelola, bagaimana akses partisipasi dibuka, dan bagaimana pemimpin lokal membangun ruang keterlibatan yang inklusif dan bermakna.

Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menelaah hubungan antara praktik kepemimpinan kepala desa dan kualitas keterlibatan perempuan dalam Musrenbang Desa masih relatif terbatas, terutama pada konteks desa di wilayah Nias. Banyak studi sebelumnya masih menempatkan partisipasi perempuan dalam ukuran yang umum, seperti hadir atau tidak hadir, aktif atau tidak aktif, tanpa menguraikan lebih jauh dimensi keterlibatan yang lebih substantif, seperti keberanian menyampaikan aspirasi, peluang memengaruhi keputusan, dan keterlibatan dalam tindak lanjut pembangunan. Di sinilah letak celah penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepemimpinan kepala desa dalam membangun keterlibatan perempuan dalam Musrenbang Desa Onowaembo Hiligara. Penelitian ini tidak hanya memeriksa kehadiran perempuan dalam forum, tetapi juga mengkaji kualitas keterlibatan mereka yang tercermin dalam kehadiran aktif, keberanian menyampaikan aspirasi, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, serta partisipasi dalam pelaksanaan dan evaluasi hasil Musrenbang. Dengan fokus tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik pada kajian kepemimpinan lokal, tata kelola desa, dan partisipasi perempuan, sekaligus menjadi masukan praktis bagi pemerintah desa dalam mengembangkan mekanisme Musrenbang yang lebih inklusif dan bermakna.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berupaya memahami secara mendalam praktik kepemimpinan kepala desa dalam memfasilitasi keterlibatan perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) pada konteks sosial yang alamiah. Desain studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada satu kasus tertentu, yaitu pelaksanaan Musrenbang Desa Onowaembo Hiligara, untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai praktik kepemimpinan, dinamika partisipasi perempuan, serta faktor-faktor yang memengaruhinya (Creswell & Poth, 2023; Yin, 2017)

Penelitian dilaksanakan di Desa Onowaembo Hiligara, Kecamatan Hiliduho, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih secara purposif karena dalam pelaksanaan Musrenbang Desa perempuan telah hadir dalam forum, tetapi keterlibatan mereka belum sepenuhnya substantif dalam menyampaikan aspirasi maupun memengaruhi keputusan pembangunan desa. Kondisi tersebut menjadikan desa ini relevan untuk mengkaji bagaimana kepemimpinan kepala desa membangun ruang partisipasi yang lebih inklusif.

Informan penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling dan dikembangkan secara terbatas melalui *snowball sampling*. Informan berjumlah tujuh orang, yang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, ketua PKK, kaur keuangan, perwakilan perempuan peserta Musrenbang, serta dua orang masyarakat desa. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan,

pengalaman, dan pengetahuan mereka mengenai proses Musrenbang Desa, khususnya pada tahap pra-musrenbang, pelaksanaan musyawarah, dan pasca-musyawarah. Teknik ini sesuai dengan penelitian kualitatif yang menekankan pemilihan partisipan secara sengaja berdasarkan relevansi informasi yang mereka miliki (Creswell & Poth, 2023; Patton, 2015)

Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali pandangan dan pengalaman informan mengenai praktik kepemimpinan kepala desa, bentuk keterlibatan perempuan, faktor pendukung dan penghambat, serta strategi yang dipandang efektif dalam meningkatkan kualitas keterlibatan perempuan. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung dinamika interaksi dalam forum Musrenbang Desa, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi data lapangan melalui penelaahan daftar hadir, notulen musyawarah, dan dokumen kegiatan desa. Kombinasi teknik ini lazim digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh data yang kaya dan kontekstual (Creswell & Poth, 2023; Patton, 2015).

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengacu pada model Miles dkk. (2014), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada tahap reduksi, data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, difokuskan, dan dikelompokkan ke dalam tema-tema penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi tematik agar hubungan antartemuan lebih mudah dipahami. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan dan verifikasi secara berulang untuk memastikan konsistensi makna dan ketepatan interpretasi. Model ini banyak digunakan dalam penelitian kualitatif karena membantu peneliti menata data lapangan secara sistematis dan analitis,

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari kepala desa, perangkat desa, peserta perempuan, dan masyarakat. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan mencocokkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas temuan dan memastikan bahwa interpretasi penelitian tetap berpijak pada data lapangan (Creswell & Poth, 2023; Patton, 2015).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil**

#### **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Onowaembo Hiligara, Kecamatan Hiliduhu, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini merupakan hasil pemekaran dari Desa Dima pada 28 November 2012, yang dibentuk dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sejak menjadi desa mandiri, Onowaembo Hiligara terus mengembangkan struktur pemerintahan dan kelembagaan desa, termasuk dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Secara administratif, desa ini terdiri atas dua dusun dengan jumlah penduduk 379 jiwa, yang meliputi 193 perempuan dan 186 laki-laki. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki proporsi yang cukup besar dalam struktur sosial desa dan secara potensial memegang peranan penting dalam proses pembangunan desa.

Dari sisi sosial dan budaya, masyarakat Desa Onowaembo Hiligara masih menjunjung tinggi nilai musyawarah, kebersamaan, dan gotong royong. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari praktik sosial masyarakat, termasuk dalam proses perencanaan pembangunan desa. Meskipun demikian, keterlibatan perempuan dalam Musrenbang Desa belum sepenuhnya optimal. Partisipasi perempuan masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti budaya patriarki, rasa sungkan untuk berbicara di forum publik, serta keterbatasan ruang dan dukungan struktural. Dalam konteks inilah, kepemimpinan kepala desa menjadi penting karena kepala desa memiliki posisi strategis dalam membangun pola komunikasi, membuka ruang partisipasi, dan mendorong keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan desa.

Secara normatif, arah pembangunan Desa Onowaembo Hiligara juga tercermin dalam visi dan misinya, yang menekankan kemandirian desa, kesejahteraan masyarakat, tata kelola

pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, dan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. Salah satu misi desa secara tegas menekankan pentingnya memperkuat peran masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan, dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan tidak hanya menjadi kebutuhan praktis dalam pembangunan desa, tetapi juga telah menjadi bagian dari arah kebijakan desa.

Dari sisi kelembagaan, Pemerintah Desa Onowaembo Hiligara memiliki struktur organisasi yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pelayanan, Kaur Umum dan Perencanaan, Kaur Keuangan, Kepala Dusun, serta staf desa. Struktur ini menunjukkan adanya pembagian tugas yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta perencanaan pembangunan desa. Dalam kaitannya dengan Musrenbang Desa, kepala desa memegang peran sentral sebagai pemimpin pemerintahan desa, sementara perangkat desa lainnya berfungsi mendukung administrasi, perencanaan, keuangan, pelayanan, dan penyaluran aspirasi masyarakat di tingkat dusun.

Untuk memperoleh data yang mendalam, penelitian ini melibatkan tujuh informan yang dipilih secara purposif berdasarkan peran, pengalaman, dan keterkaitan mereka dengan pelaksanaan Musrenbang Desa. Informan tersebut terdiri atas Kepala Desa sebagai informan kunci; Sekretaris Desa, Ketua PKK, dan Kaur Keuangan sebagai informan utama; serta perwakilan perempuan peserta Musrenbang dan masyarakat desa sebagai informan pendukung. Karakteristik informan yang beragam dari segi jabatan, jenis kelamin, usia, dan pengalaman diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik kepemimpinan kepala desa, faktor pendukung dan penghambat keterlibatan perempuan, serta strategi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas partisipasi perempuan dalam Musrenbang Desa.

Berdasarkan gambaran umum tersebut, Desa Onowaembo Hiligara merupakan konteks yang relevan untuk mengkaji hubungan antara kepemimpinan kepala desa dan keterlibatan perempuan dalam Musrenbang Desa. Kondisi sosial, budaya, kelembagaan, dan komposisi masyarakat desa memberikan landasan yang memadai untuk memahami bagaimana keterlibatan perempuan dibangun, difasilitasi, dan dihadapkan pada berbagai tantangan dalam proses perencanaan pembangunan desa.

Berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya disajikan temuan penelitian yang diperoleh dari para informan dan dianalisis secara tematik sesuai dengan fokus penelitian, yaitu praktik kepemimpinan kepala desa, faktor pendukung dan penghambat keterlibatan perempuan, serta strategi peningkatan kualitas keterlibatan perempuan dalam Musrenbang Desa Onowaembo Hiligara.

### **Temuan Awal Berdasarkan Informan**

Temuan awal penelitian ini disusun berdasarkan hasil wawancara terhadap tujuh informan, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua PKK, Kaur Keuangan, perwakilan perempuan peserta Musrenbang, serta dua orang masyarakat Desa Onowaembo Hiligara. Wawancara dilaksanakan pada Kamis, 15 Januari 2026. Secara umum, seluruh informan menunjukkan pandangan yang relatif konsisten bahwa kepemimpinan kepala desa memiliki peran penting dalam membangun keterlibatan perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa), meskipun kualitas keterlibatan tersebut belum sepenuhnya optimal.

Temuan awal memperlihatkan bahwa kepala desa dipersepsikan sebagai aktor kunci dalam menciptakan ruang partisipasi perempuan melalui sikap terbuka, pemberian kesempatan berbicara, serta dorongan moral agar perempuan lebih berani menyampaikan aspirasi dalam forum Musrenbang Desa. Kepala desa sendiri menegaskan bahwa dalam pengambilan keputusan ia tidak membedakan usulan laki-laki dan perempuan, melainkan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara umum. Sebagaimana dinyatakan oleh informan R1, *"Dalam pengambilan keputusan, saya tidak membedakan usulan laki-laki dan perempuan, tetapi mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara umum...."* Pernyataan ini menunjukkan bahwa kepala desa memaknai partisipasi perempuan sebagai bagian dari kepentingan kolektif desa.

Pandangan tersebut diperkuat oleh informan lain. Sekretaris desa, Ketua PKK, Kaur Keuangan, dan perwakilan perempuan sama-sama menyatakan bahwa aspirasi perempuan,

terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar, kesehatan keluarga, jamban, air bersih, posyandu, dan kesejahteraan ibu dan anak, telah mendapat perhatian dalam forum Musrenbang. Meskipun demikian, mereka juga mengakui bahwa tidak semua usulan perempuan dapat direalisasikan karena harus mempertimbangkan kemampuan anggaran serta skala prioritas pembangunan desa. Dengan demikian, perhatian terhadap usulan perempuan telah ada, tetapi realisasinya masih dipengaruhi oleh faktor teknis dan administratif.

Selain sebagai pengambil keputusan, kepala desa juga dipandang berperan aktif dalam mendorong kehadiran dan keberanian perempuan untuk terlibat dalam forum. Hampir semua informan menyebut bahwa kepala desa secara langsung memberi kesempatan kepada perempuan untuk berbicara, bahkan memotivasi mereka agar tidak hanya hadir, tetapi juga aktif menyampaikan pendapat. Informan R5, misalnya, menyatakan, *"Kalau Kepala Desa mempersilakan perempuan berbicara, kami jadi lebih berani dan merasa dihargai."* Kutipan ini menunjukkan bahwa dukungan verbal dan simbolik dari pimpinan desa berpengaruh terhadap rasa percaya diri perempuan dalam forum publik.

Temuan awal juga memperlihatkan bahwa komunikasi kepala desa dengan perempuan berlangsung cukup baik, baik sebelum maupun selama Musrenbang Desa. Beberapa informan menjelaskan bahwa informasi mengenai Musrenbang biasanya disampaikan melalui perangkat desa dan PKK, sementara saat forum berlangsung kepala desa menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Kondisi ini membantu perempuan memahami agenda musyawarah dan merasa lebih nyaman dalam mengikuti pembahasan. Namun demikian, terdapat catatan bahwa informasi Musrenbang belum selalu menjangkau seluruh perempuan desa secara merata, sehingga masih ada perempuan yang belum sepenuhnya siap atau percaya diri saat menghadiri forum.

Dari sisi internal pemerintahan desa, kepala desa juga dinilai berperan dalam mengarahkan perangkat desa agar tidak mendominasi forum dan memberi kesempatan yang sama kepada perempuan untuk menyampaikan pendapat. Perangkat desa diposisikan sebagai fasilitator yang membuka ruang bicara dan mencatat usulan perempuan. Walaupun demikian, sebagian informan masih melihat bahwa dalam praktiknya forum Musrenbang kerap didominasi oleh laki-laki, baik karena kebiasaan lama maupun karena perempuan belum sepenuhnya nyaman berbicara di ruang publik. Artinya, secara normatif ruang partisipasi telah dibuka, tetapi secara sosiokultural kualitas partisipasi perempuan masih menghadapi hambatan.

Dalam aspek evaluasi, temuan awal menunjukkan bahwa kepala desa memiliki kesadaran untuk menilai keterlibatan perempuan, meskipun evaluasi tersebut masih bersifat sederhana. Indikator yang digunakan terutama adalah kehadiran perempuan dalam forum dan keberlanjutan program-program yang menyentuh kebutuhan perempuan, seperti posyandu, dukungan ibu hamil, kesehatan ibu dan anak, serta kegiatan sosial lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen kepala desa terhadap keterlibatan perempuan tidak hanya tampak dalam forum Musrenbang, tetapi juga dalam implementasi program yang dianggap responsif terhadap kebutuhan perempuan.

Temuan awal juga mengungkap bahwa sikap kepala desa dalam menghadapi perbedaan pendapat di forum Musrenbang dinilai cukup terbuka, tenang, dan tidak memihak. Informan dari berbagai posisi menyatakan bahwa kepala desa cenderung mendengarkan setiap usulan, termasuk pendapat perempuan, tanpa langsung menolak atau mematahkan pendapat yang berbeda. Pendekatan musyawarah, pencarian jalan tengah, dan penjelasan yang rasional terhadap alasan diterima atau tidaknya usulan dianggap membantu menciptakan suasana forum yang kondusif dan lebih inklusif.

Dilihat dari empat indikator partisipasi, yakni kehadiran, keberanian menyampaikan pendapat, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, serta keterlibatan dalam pelaksanaan dan evaluasi program, temuan awal memperlihatkan pola yang cukup jelas. Pada indikator kehadiran, informan sepakat bahwa jumlah perempuan dalam Musrenbang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini didukung oleh undangan resmi dari pemerintah desa, peran PKK, serta meningkatnya kesadaran perempuan untuk hadir. Namun, kehadiran perempuan masih terhambat oleh kesibukan rumah tangga, keterbatasan waktu, rasa sungkan, dan pandangan budaya bahwa forum desa lebih identik dengan urusan laki-laki.

Pada indikator keberanian berbicara, informan juga melihat adanya perkembangan positif, terutama pada perempuan yang aktif dalam PKK atau sudah terbiasa mengikuti kegiatan desa. Dukungan kepala desa, suasana forum yang terbuka, dan kesempatan berbicara secara langsung menjadi faktor pendukung utama. Sebaliknya, rasa malu, takut salah bicara, kurang percaya diri, dan anggapan bahwa pendapat perempuan kurang penting masih menjadi hambatan yang cukup kuat. Ini menunjukkan bahwa keberanian berbicara perempuan tidak hanya dipengaruhi oleh ruang formal yang tersedia, tetapi juga oleh faktor budaya dan psikologis.

Pada indikator keterlibatan dalam pengambilan keputusan, seluruh informan menunjukkan penilaian yang lebih kritis. Perempuan dinilai telah terlibat pada tahap penyampaian usulan dan pembahasan awal, tetapi belum berperan kuat dalam keputusan akhir. Pembahasan lanjutan dan keputusan final masih lebih banyak dipengaruhi oleh perangkat desa dan tokoh laki-laki, selain juga oleh pertimbangan anggaran dan aturan administratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam Musrenbang Desa telah hadir secara prosedural, tetapi belum sepenuhnya setara secara substantif dalam proses pengambilan keputusan.

Sementara itu, pada indikator keterlibatan dalam pelaksanaan dan evaluasi program, temuan awal menunjukkan bahwa perempuan relatif aktif pada tahap pelaksanaan, terutama dalam program kesehatan, sosial, posyandu, dan kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan keluarga. Akan tetapi, keterlibatan perempuan dalam evaluasi program masih terbatas. Evaluasi lebih sering dilakukan secara administratif oleh perangkat desa atau dalam rapat khusus yang tidak banyak melibatkan perempuan. Dengan demikian, perempuan lebih banyak berperan sebagai pelaksana program daripada sebagai evaluator program.

Temuan terakhir berkaitan dengan strategi kepemimpinan kepala desa. Hampir seluruh informan sepakat bahwa strategi yang sudah diterapkan kepala desa, seperti keterbukaan, pemberian ruang berbicara, komunikasi yang mudah dipahami, dan suasana forum yang inklusif, telah berdampak positif terhadap peningkatan partisipasi perempuan, terutama dari sisi kehadiran dan keberanian berbicara. Namun, seluruh informan juga menilai bahwa strategi tersebut masih perlu diperkuat. Strategi ke depan yang paling sering muncul adalah perlunya pendampingan, pembinaan, pelatihan, dan forum diskusi awal khusus bagi perempuan sebelum Musrenbang dilaksanakan. Menurut para informan, langkah ini penting agar perempuan lebih siap, lebih percaya diri, memahami proses perencanaan dan penganggaran desa, serta mampu berpartisipasi secara lebih bermakna dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan temuan awal tersebut, dapat dipahami bahwa kepemimpinan kepala desa di Desa Onowaembo Hiligara telah menunjukkan arah yang inklusif terhadap keterlibatan perempuan dalam Musrenbang Desa. Namun demikian, kualitas partisipasi perempuan masih belum sepenuhnya merata pada seluruh tahapan partisipasi. Perempuan cenderung lebih tampak pada aspek kehadiran dan pelaksanaan program, tetapi masih relatif terbatas pada aspek keberanian berbicara secara luas, pengambilan keputusan, dan evaluasi program. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut melalui pengkodean dan pengelompokan tematik agar pola-pola temuan ini dapat dipahami secara lebih sistematis.

Berdasarkan narasi awal hasil wawancara, temuan penelitian ini selanjutnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga tema utama. Pertama, praktik kepemimpinan kepala desa dalam memfasilitasi keterlibatan perempuan, yang mencakup keterbukaan dalam menerima usulan, pemberian kesempatan berbicara, komunikasi yang inklusif, arahan kepada perangkat desa untuk memberi ruang partisipasi, evaluasi sederhana terhadap keterlibatan perempuan, dan sikap terbuka dalam menghadapi perbedaan pendapat. Kedua, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keterlibatan perempuan, yang tampak pada empat indikator partisipasi, yaitu kehadiran, keberanian menyampaikan pendapat, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, serta keterlibatan dalam pelaksanaan dan evaluasi program. Ketiga, strategi kepemimpinan yang efektif dan perlu diperkuat, terutama yang berkaitan dengan keterbukaan pimpinan, forum yang inklusif, pendampingan perempuan, pelatihan pra-Musrenbang, serta penguatan peran PKK sebagai saluran strategis partisipasi perempuan.

### Proses Koding dan Konstruksi Tema

Proses koding dilakukan terhadap transkrip wawancara informan R1 sampai R7 untuk mengidentifikasi pola-pola awal yang muncul dari data lapangan. Pada tahap open coding, peneliti menemukan sejumlah kode awal yang berkaitan dengan komunikasi pra-sidang, penyampaian undangan dan materi Musrenbang, ruang bicara perempuan dalam forum, transparansi prioritas dan alasan keputusan, keterbatasan anggaran, tindak lanjut pasca-sidang, keberanian perempuan berbicara, forum diskusi awal, serta pendampingan dan pelatihan bagi perempuan.

Kode-kode awal tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam beberapa subtema dan tema yang disusun sesuai dengan tiga momen utama Musrenbang Desa, yaitu pra-sidang, saat sidang, dan pasca-sidang, serta empat indikator keterlibatan perempuan, yaitu hadir aktif, menyampaikan aspirasi, terlibat dalam pengambilan keputusan, serta tindak lanjut dan evaluasi. Dengan cara ini, proses koding tidak hanya membantu mereduksi data, tetapi juga memudahkan peneliti dalam menyusun pola temuan secara sistematis.

Tabel 1 berikut menyajikan hasil pemetaan kode awal ke dalam subtema dan tema utama. Setiap tema dirumuskan berdasarkan keterulangan makna dalam pernyataan informan dan diperkuat dengan kutipan representatif sebagai jejak audit data lapangan. Penyajian ini menjadi dasar bagi analisis temuan penelitian pada subbagian berikutnya.

**Tabel 1. Ringkasan Konstruksi Tema Temuan Penelitian**

<b>Tema</b>	<b>Subtema Utama</b>	<b>Indikator Keterlibatan</b>	<b>Informan Kunci</b>	<b>Inti Temuan</b>
<b>Komunikasi pra-sidang</b>	Undangan jelas, materi sederhana, diskusi awal	Hadir aktif	R1, R2, R3	Komunikasi awal yang jelas membantu perempuan hadir lebih siap dan lebih percaya diri mengikuti Musrenbang.
<b>Pengelolaan forum saat sidang</b>	Kesempatan bicara setara, ruang aman, fasilitasi kepala desa	Menyampaikan aspirasi	R2, R5, R7	Perempuan lebih berani menyampaikan pendapat ketika forum dikelola secara terbuka dan inklusif.
<b>Transparansi pengambilan keputusan</b>	Penjelasan prioritas, alasan keputusan, pertimbangan usulan perempuan	Terlibat dalam keputusan	R2, R4, R7	Keterbukaan terhadap alasan prioritas dan keterbatasan anggaran meningkatkan persepsi keadilan dalam keputusan.
<b>Tindak lanjut pasca-sidang</b>	Pencatatan aspirasi, pelaksanaan program, evaluasi	Tindak lanjut dan evaluasi	R1, R2, R5	Perempuan cukup aktif dalam pelaksanaan program, tetapi masih terbatas dalam evaluasi program.
<b>Faktor pendorong</b>	Komitmen kepala desa, dukungan perangkat, peran PKK	Lintas indikator	R1, R2, R3	Dukungan kepemimpinan dan kelembagaan desa menjadi faktor utama pendorong partisipasi perempuan.
<b>Faktor penghambat</b>	Anggaran terbatas, beban domestik, rasa malu, budaya patriarki	Lintas indikator	R4, R5, R7	Hambatan struktural, budaya, dan psikologis masih memengaruhi kualitas keterlibatan perempuan.

<b>Strategi peningkatan kualitas</b>	Pendampingan, pelatihan, forum awal, evaluasi inklusif	Lintas indikator	R1, R3, R4	Peningkatan kualitas partisipasi memerlukan strategi yang berfokus pada kesiapan, keberanian, dan keterlibatan berkelanjutan perempuan.
--------------------------------------	--	------------------	------------	---

Sumber: Hasil olahan data wawancara peneliti, 2026.

### Penyajian Temuan Berdasarkan Tema

a. Komunikasi pra-sidang dan hadir aktif

Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi fasilitatif pada tahap pra-sidang menjadi prasyarat penting bagi munculnya keterlibatan perempuan yang lebih aktif dalam Musrenbang Desa. Informasi dan undangan yang jelas, serta penyampaian materi dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, membantu perempuan memahami agenda musyawarah dan hadir dengan kesiapan yang lebih baik. Selain itu, briefing atau diskusi awal sebelum sidang juga berperan dalam meningkatkan rasa percaya diri perempuan untuk mengikuti forum. Kondisi ini tampak dari pernyataan informan yang menegaskan bahwa materi Musrenbang disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami dan bahwa pendampingan awal membuat perempuan lebih siap mengikuti forum ([R2, 15 Januari 2026]; [R3, 15 Januari 2026]). Dengan demikian, tahap pra-sidang tidak hanya berpengaruh pada kehadiran perempuan secara fisik, tetapi juga pada kesiapan mereka untuk terlibat secara lebih bermakna.

b. Fasilitasi sidang dan aspirasi bermakna

Pada tahap sidang, kualitas pengelolaan forum berhubungan langsung dengan keberanian perempuan dalam menyampaikan aspirasi. Temuan menunjukkan bahwa pemberian kesempatan bicara secara proporsional, sikap moderator yang tidak membiarkan dominasi satu pihak, serta ruang diskusi yang lebih aman, mendorong perempuan untuk lebih berani berbicara. Beberapa informan menilai bahwa ketika kepala desa secara langsung mempersilakan perempuan berbicara, mereka merasa dihargai dan lebih percaya diri untuk menyampaikan pendapat. Selain itu, perlunya forum diskusi kecil sebelum pleno juga diungkapkan sebagai strategi untuk membantu perempuan menyusun dan menyampaikan gagasan secara lebih nyaman ([R5, 15 Januari 2026]; [R7, 15 Januari 2026]). Hal ini menunjukkan bahwa aspirasi perempuan lebih mudah muncul ketika forum dikelola secara inklusif dan partisipatif.

c. Transparansi keputusan dan keterlibatan Perempuan

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa transparansi dalam pengambilan keputusan merupakan unsur penting untuk mendorong keterlibatan perempuan secara lebih substantif. Informan menyatakan bahwa penjelasan terbuka mengenai kondisi anggaran, skala prioritas, dan alasan diterima atau ditundanya suatu usulan membuat perempuan lebih memahami proses keputusan dalam Musrenbang. Ketika alasan keputusan disampaikan secara terbuka, perempuan merasa bahwa usulan mereka tetap dihargai meskipun tidak seluruhnya dapat direalisasikan ([R4, 15 Januari 2026]; [R7, 15 Januari 2026]). Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam keputusan tidak hanya bergantung pada kesempatan menyampaikan usulan, tetapi juga pada sejauh mana proses penentuan prioritas berlangsung secara transparan dan dapat dipahami oleh seluruh peserta.

d. Tindak lanjut, umpan balik, dan evaluasi

Pada tahap pasca-sidang, tindak lanjut terhadap hasil Musrenbang menjadi faktor penting yang menentukan apakah partisipasi perempuan benar-benar berdampak pada pembangunan desa. Temuan menunjukkan bahwa pencatatan aspirasi, kejelasan mekanisme tindak lanjut, serta penjelasan mengenai langkah berikutnya dapat memperkuat kepercayaan perempuan terhadap forum Musrenbang. Namun, keterlibatan perempuan dalam tahap evaluasi masih relatif terbatas. Beberapa informan menyatakan bahwa perempuan cukup

aktif dalam pelaksanaan program, terutama pada kegiatan sosial dan kesehatan, tetapi belum banyak dilibatkan dalam evaluasi formal karena proses tersebut masih lebih banyak dilakukan oleh perangkat desa ([R1, 15 Januari 2026]; [R5, 15 Januari 2026]; [R7, 15 Januari 2026]). Temuan ini menunjukkan bahwa ruang partisipasi perempuan pada tahap pasca-sidang masih perlu diperkuat, khususnya dalam pemantauan dan evaluasi program.

- e. Faktor pendorong dan penghambat lintas tahap  
Secara lintas tahap, penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan perempuan dalam Musrenbang Desa dipengaruhi oleh kombinasi faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong utama meliputi komitmen kepala desa untuk membuka ruang partisipasi perempuan, dukungan perangkat desa dalam penyampaian undangan dan informasi, serta peran PKK dalam memotivasi perempuan untuk hadir dan berbicara. Sebaliknya, faktor penghambat yang muncul secara berulang meliputi keterbatasan anggaran desa, kompetisi antarprioritas pembangunan, kesibukan rumah tangga, rasa malu, kurang percaya diri, dan norma budaya yang masih menempatkan forum desa sebagai ruang yang lebih dekat dengan laki-laki ([R1, 15 Januari 2026]; [R4, 15 Januari 2026]). Temuan ini memperlihatkan bahwa peningkatan keterlibatan perempuan tidak cukup hanya melalui pembukaan forum, tetapi juga memerlukan upaya untuk mengatasi hambatan sosial, budaya, dan struktural.
- f. Strategi peningkatan kualitas partisipasi Perempuan  
Berdasarkan keseluruhan temuan, strategi peningkatan keterlibatan perempuan dalam Musrenbang Desa tidak cukup diarahkan pada peningkatan jumlah kehadiran saja, tetapi perlu berorientasi pada kualitas partisipasi. Pada tahap pra-sidang, strategi yang diperlukan meliputi briefing, pendampingan, dan pelatihan awal bagi perempuan agar lebih siap mengikuti forum. Pada tahap sidang, diperlukan teknik fasilitasi yang lebih peka terhadap partisipasi perempuan, termasuk pemberian ruang bicara yang adil dan penjelasan prioritas secara terbuka. Sementara itu, pada tahap pasca-sidang, diperlukan penguatan tindak lanjut, penyampaian umpan balik, dan pelibatan perempuan dalam evaluasi program. Dengan demikian, strategi kepemimpinan yang efektif adalah strategi yang mampu menggeser partisipasi perempuan dari sekadar hadir dalam forum menuju keterlibatan yang lebih bermakna dalam penyampaian aspirasi, pengambilan keputusan, serta tindak lanjut pembangunan desa.

## Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa di Desa Onowaembo Hiligara berperan penting sebagai fasilitator partisipasi perempuan dalam Musrenbang Desa, terutama melalui komunikasi pra-sidang yang lebih terbuka, pemberian kesempatan bicara kepada perempuan, pengelolaan forum yang lebih inklusif, serta penjelasan mengenai prioritas program dan keterbatasan anggaran. Dari perspektif teori partisipasi, kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan tidak lagi ditempatkan semata-mata sebagai pelengkap kehadiran dalam forum, tetapi mulai memperoleh ruang untuk menyampaikan aspirasi dan ikut memengaruhi pembahasan pembangunan desa (Cornwall, 2008; Fung, 2006)

Namun demikian, temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa keterlibatan perempuan belum sepenuhnya mencapai partisipasi yang substantif. Perempuan relatif lebih tampak pada aspek kehadiran, penyampaian usulan, dan pelaksanaan program, tetapi masih terbatas pada aspek pengambilan keputusan akhir dan evaluasi program. Jika ditafsirkan menggunakan kerangka partisipasi Arnstein (1969), kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam Musrenbang Desa Onowaembo Hiligara cenderung berada pada tingkat *consultation* dan *placation*, belum sampai pada tingkat *partnership*. Artinya, suara perempuan telah didengar dan dipertimbangkan, tetapi daya pengaruhnya terhadap keputusan final belum sepenuhnya setara dengan aktor-aktor lain dalam forum desa.

Penafsiran tersebut juga sejalan dengan pandangan Cornwall (2008) yang menegaskan bahwa partisipasi tidak dapat diukur hanya dari kehadiran fisik dalam forum, melainkan harus dilihat dari kualitas keterlibatan, ruang bicara, dan kemampuan memengaruhi keputusan. Dalam penelitian ini, jumlah kehadiran perempuan memang menunjukkan kecenderungan meningkat, dan perempuan mulai lebih berani menyampaikan aspirasi, khususnya terkait kebutuhan dasar,

kesehatan, posyandu, dan kesejahteraan keluarga. Akan tetapi, keberanian berbicara, keterlibatan dalam keputusan akhir, dan partisipasi dalam evaluasi program masih belum merata. Dengan demikian, partisipasi perempuan di desa ini masih berada pada persimpangan antara partisipasi prosedural dan partisipasi yang lebih bermakna.

Selain itu, jika dikaitkan dengan Fung (2006), temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa kualitas partisipasi sangat dipengaruhi oleh desain dan tata kelola forum. Dalam konteks Musrenbang Desa Onowaembo Hiligara, perempuan menjadi lebih aktif ketika forum dikelola secara fasilitatif, yaitu saat kepala desa memberi kesempatan berbicara, perangkat desa tidak terlalu mendominasi, informasi disampaikan dengan bahasa sederhana, dan alasan prioritas dijelaskan secara terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi yang inklusif tidak terjadi secara otomatis hanya karena forum tersedia, tetapi sangat dipengaruhi oleh bagaimana forum tersebut diatur, siapa yang diberi ruang, dan bagaimana komunikasi dibangun selama proses musyawarah (Fung, 2006).

Dari sisi kepemimpinan, temuan penelitian mengindikasikan bahwa kepala desa menjalankan praktik kepemimpinan yang relatif fasilitatif dan partisipatif, bukan sekadar administratif. Kepala desa tidak hanya hadir sebagai pengambil keputusan formal, tetapi juga sebagai aktor yang membentuk suasana forum, mendorong perempuan untuk berbicara, serta mengarahkan perangkat desa agar memberi ruang yang lebih setara. Dalam perspektif kepemimpinan, peran seperti ini mencerminkan fungsi pemimpin sebagai pihak yang memengaruhi, memfasilitasi, dan memberdayakan anggota untuk mencapai tujuan bersama (Northouse, 2021). Dengan demikian, kepala desa dalam penelitian ini tidak hanya menjalankan fungsi struktural pemerintahan desa, tetapi juga fungsi relasional yang menentukan kualitas partisipasi warga, khususnya perempuan.

Temuan lain yang penting adalah bahwa partisipasi perempuan dalam Musrenbang Desa bersifat bertahap. Pada tahap pra-sidang, faktor penentunya adalah informasi, undangan, dan kesiapan awal. Pada tahap sidang, faktor yang paling menentukan adalah ruang bicara, rasa aman, dan keterbukaan forum. Sementara itu, pada tahap pasca-sidang, titik lemah partisipasi perempuan justru tampak pada keterbatasan pelibatan dalam evaluasi dan umpan balik program. Pola ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan bukanlah fenomena tunggal, tetapi berlangsung secara bertingkat sesuai dengan tahapan proses Musrenbang. Oleh karena itu, strategi peningkatan partisipasi perempuan tidak cukup hanya menekankan jumlah kehadiran, tetapi juga harus dirancang untuk memperkuat kualitas keterlibatan perempuan pada setiap tahap forum (Cornwall, 2008; Fung, 2006)

Secara keseluruhan, penafsiran teoretik atas temuan ini menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam Musrenbang Desa Onowaembo Hiligara telah bergerak ke arah yang lebih inklusif, tetapi belum sepenuhnya mencapai partisipasi yang substantif. Kepala desa telah memainkan peran penting sebagai fasilitator partisipasi, tetapi kualitas keterlibatan perempuan masih dibatasi oleh faktor budaya, rasa kurang percaya diri, keterbatasan pengetahuan teknis, dan dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan akhir. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa forum partisipatif yang inklusif memerlukan kombinasi antara kepemimpinan yang terbuka, desain forum yang mendukung, serta penguatan kapasitas perempuan secara berkelanjutan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Ali (2023) yang menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam Musrenbang desa dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat dan dukungan kepemimpinan lokal. Dalam penelitian ini, dukungan tersebut tampak dalam peran kepala desa yang membuka ruang partisipasi, mendorong perempuan untuk berbicara, dan menempatkan aspirasi perempuan sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat desa. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan Monica dan Fauziah (2017) yang menemukan bahwa partisipasi perempuan dalam pembangunan desa relatif tampak pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, tetapi belum optimal pada tahap evaluasi dan pemantauan. Pola yang sama ditemukan di Desa Onowaembo Hiligara, di mana perempuan cukup aktif hadir dalam Musrenbang dan pelaksanaan program sosial-kesehatan, tetapi masih terbatas dalam evaluasi program desa.

Selanjutnya, temuan ini beririsan dengan Neno dkk. (2025) yang menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam Musrenbang Desa Niukbaun masih menghadapi stereotip gender

dan keterbatasan kesempatan strategis. Dalam penelitian ini, hambatan yang serupa juga tampak, yaitu beban domestik, rasa malu, kurang percaya diri, dan pandangan budaya yang masih menempatkan forum desa sebagai ruang yang lebih dekat dengan laki-laki. Temuan penelitian ini juga mendukung studi Razak dkk. (2020) yang menegaskan pentingnya komunikasi pemerintahan dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam Musrenbang. Studi tersebut menemukan bahwa faktor undangan dari pemimpin lokal menjadi pendorong partisipasi perempuan yang paling tinggi, sementara dialog langsung dengan pemerintah masih rendah. Dalam konteks Onowaembo Hiligara, pola yang sama terlihat: perempuan lebih aktif ketika kepala desa dan perangkat desa secara langsung memberi ruang bicara dan membangun komunikasi yang mudah dipahami.

Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan Sugito dkk. (2018) yang menunjukkan bahwa forum komunikasi pemberdayaan perempuan desa berperan penting dalam membuka peluang perempuan untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemberdayaan. Kesamaan ini memperkuat temuan bahwa komunikasi partisipatif dan forum pendukung perempuan merupakan elemen penting untuk meningkatkan kualitas keterlibatan perempuan di tingkat desa. Dalam aspek tata kelola Musrenbang, temuan penelitian ini juga sejalan dengan Kurniawati & Eprilianto (2022) yang menekankan bahwa pelaksanaan Musrenbang desa yang baik ditopang oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Pada penelitian ini, transparansi mengenai prioritas dan anggaran terbukti membantu perempuan memahami proses keputusan, walaupun belum seluruhnya membuat mereka berpengaruh setara dalam keputusan akhir.

Secara lebih praktis, arah strategi yang muncul dari penelitian ini juga didukung oleh program pelatihan kepemimpinan perempuan di Desa Salenrang Rammang-Rammang (Ali dkk., 2023), yang menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas perempuan melalui pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan peserta sebagai bekal untuk berpartisipasi lebih aktif dalam Musrenbang. Ini relevan dengan temuan penelitian ini bahwa briefing, pendampingan, dan pelatihan pra-Musrenbang merupakan strategi yang perlu diperkuat.

Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya mengonfirmasi hasil-hasil studi terdahulu, tetapi juga menambahkan penekanan bahwa kualitas partisipasi perempuan perlu dibaca secara bertahap dalam tiga momen Musrenbang, yaitu pra-sidang, saat sidang, dan pasca-sidang. Kontribusi ini penting karena menunjukkan bahwa persoalan partisipasi perempuan tidak muncul secara seragam: pada tahap pra-sidang masalah utamanya adalah akses informasi dan kesiapan; pada tahap sidang masalah utamanya adalah keberanian berbicara dan ruang pengaruh; sedangkan pada tahap pasca-sidang masalah utamanya adalah minimnya pelibatan perempuan dalam evaluasi dan umpan balik program. Secara substantif, temuan ini menegaskan bahwa transformasi dari partisipasi simbolik menuju partisipasi yang lebih bermakna memerlukan kombinasi antara kepemimpinan kepala desa yang fasilitatif, komunikasi yang inklusif, desain forum yang adil, dan penguatan kapasitas perempuan secara berkelanjutan.

### **Implikasi Penelitian**

Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam Musrenbang Desa tidak cukup ditingkatkan melalui kehadiran formal semata, tetapi perlu diperkuat melalui kepemimpinan kepala desa yang fasilitatif, komunikasi yang inklusif, dan forum yang memberi ruang bicara secara setara. Secara teoretis, temuan ini menegaskan bahwa kualitas partisipasi perempuan perlu dipahami sebagai proses bertahap yang mencakup kehadiran, penyampaian aspirasi, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, serta tindak lanjut dan evaluasi. Secara praktis, hasil penelitian ini mengimplikasikan perlunya penguatan strategi pra-Musrenbang, seperti briefing, pendampingan, dan pelatihan bagi perempuan, serta perlunya pelibatan perempuan yang lebih nyata dalam evaluasi program desa. Dengan demikian, pemerintah desa perlu mengembangkan Musrenbang yang tidak hanya partisipatif secara prosedural, tetapi juga inklusif secara substantif.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada satu desa sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi secara luas pada seluruh konteks desa. Kedua, jumlah informan relatif terbatas dan masih berfokus pada aktor-aktor yang terlibat langsung dalam Musrenbang Desa. Ketiga, penelitian ini lebih banyak menyoroti dinamika partisipasi perempuan dari perspektif proses forum, sehingga belum mendalami secara lebih luas pengaruh faktor eksternal, seperti kebijakan supra-desa, kondisi ekonomi rumah tangga, dan relasi sosial yang lebih kompleks. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan dilakukan pada lebih dari satu desa dan dengan cakupan informan yang lebih beragam agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan desa.

### **4. Simpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa memiliki peran penting dalam membangun keterlibatan perempuan dalam Musrenbang Desa Onowaembo Hiligara. Praktik kepemimpinan yang ditunjukkan melalui komunikasi yang terbuka, pemberian kesempatan berbicara, arahan kepada perangkat desa untuk memberi ruang partisipasi, serta sikap yang responsif terhadap aspirasi perempuan telah mendorong meningkatnya kehadiran dan keberanian perempuan dalam forum Musrenbang.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung utama meliputi komitmen kepala desa, dukungan perangkat desa, peran PKK, serta komunikasi yang lebih inklusif. Sementara itu, faktor penghambat yang masih kuat adalah kesibukan rumah tangga, rasa malu dan kurang percaya diri, keterbatasan pemahaman teknis, serta budaya yang masih cenderung menempatkan laki-laki sebagai aktor dominan dalam forum pengambilan keputusan.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa strategi kepemimpinan yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas keterlibatan perempuan bukan hanya membuka ruang kehadiran, tetapi juga memperkuat kesiapan dan keberanian perempuan melalui briefing, pendampingan, pelatihan, serta forum diskusi awal sebelum Musrenbang. Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam Musrenbang Desa perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan kuantitas kehadiran, tetapi juga pada penguatan kualitas partisipasi dalam penyampaian aspirasi, pengambilan keputusan, serta tindak lanjut dan evaluasi program pembangunan desa.

### **5. Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Onowaembo Hiligara dan seluruh informan penelitian yang telah memberikan waktu, dukungan, serta data dan informasi selama pelaksanaan penelitian. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan akademik dan teknis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian artikel ini.

### **6. Daftar Pustaka**

- Ali, C. (2023). KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM MUSRENBANG TINGKAT DESA KOTA BANDA ACEH. *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*, 9(1), 53–82. <https://doi.org/10.22373/jai.v9i1.2412>
- Ali, N. A., Mahka, T. Y. J., Yusri, Y., Baharuddin, N., Talib, M. I., & Hendri, Muh. (2023). Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Perempuan pada Rapat Musrenbang di Desa Salenrang Rammang-Rammang. *PENGABDI*, 5(2). <https://doi.org/10.26858/pengabdi.v5i2.68070>
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Cornwall, A. (2008). Unpacking “Participation”: models, meanings and practices. *Community Development Journal*, 43(3), 269–283. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsn010>

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Fung, A. (2006). Varieties of Participation in Complex Governance. *Public Administration Review*, 66(s1), 66–75. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00667.x>
- Kurniawati, I. P., & Eprilianto, D. F. (2022). ANALISIS PELAKSANAAN MUSRENBANG DESA TERHADAP PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI DESA GAYAM KABUPATEN KEDIRI. *Publika*, 441–456. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p441-456>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Monica, Y. F., & Fauziah, L. (2017). Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Candi. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 5(2), 217–228. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v5i2.1314>
- Neno, M. A., Toda, H., Rene, M. O., & Pradana, I. P. Y. B. (2025). PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM MUSRENBANG (Studi Pada Desa Niukbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang). *Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik*, 3(1), 347–363. <https://doi.org/10.71128/kybernology.v3i1.297>
- Northouse, P. G. (2021). *Leadership: Theory and Practice* (9th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (4th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Razak, T. S., Azuz, F., & Ibrahim, S. (2020). PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM MUSRENBANG: PERSPEKTIF KOMUNIKASI PEMERINTAHAN. *Jurnal Pallangga Praja*, 2(2), 149–165.
- Sugito, T., Windiasih, R., & Sulaiman, A. I. (2018). AKTUALISASI PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DALAM FORUM KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DESA. *Journal Acta Diurna*, 14(1). <https://doi.org/10.20884/1.actadiurna.2018.14.1.1138>
- Yin, R. K. (2017). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications, Inc.